

## MADRASAH: PERKEMBANGAN, MODERNISASI DAN IMPLIKASINYA *Mas'adah*<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Madrasah is one form of Islamic educational institutions, early development, the madrasa is an independent educational institution, after Indonesia's independence, the government set a madrasa as a model and source of national education under the 1945 Constitution, in 1975, issued a joint decree (SKB) three of the Minister, the Minister of Education and Culture, Ministry of Interior and Minister of Religious Affairs of the Madrasah Quality Improvement which aims to madrasas obtain the same position with the public schools in the national education system. As a follow-up is the letter of the joint decision between the Minister of Education and Culture, Religious Affairs Minister No. 9299/U/1984 No. 45 of the Public School Curriculum Standardization settings and Madrasah curriculum. After the specified Law number 20 of 2003 on national education systems as a replacement and refinement of the previous Act VI of chapter 17 and chapter 18, the position of madrasas grew stronger as expressly referred to its position parallel to the public schools of equal rank. The position is formally defined as a product of equal educational policy of government, certainly not fully able to boost the prestige of academic madrasas until today as the emergence of opinion that the madrasas are second class. Therefore madrasas must reorganize itself to catch up in the mastery of general knowledge in public schools while providing adequate attention to the mastery of religious knowledge.*

**Keywords:** *Madrasah, Development, Modernization*

### Pendahuluan

Islam pada mulanya diperkenalkan oleh pedagang Muslim yang melakukan kontak dagang dengan penduduk Indonesia. Besarnya pengaruh saudagar muslim mampu memperkenalkan nilai-nilai Islam terutama ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai perdagangan yang memberikan keuntungan ekonomi secara maksimal, sekaligus membatasi adanya pilihan terhadap agama-agama lain.<sup>2</sup>

Tentang siapa yang menyebarkan agama Islam, menurut Robson, pedagang Islam dan mereka mayoritas serta interest terhadap persoalan dan praktik agama. Dengan demikian, dapatkah para saudagar muslim dikatakan sebagai instrument penyebaran Islam? Robson mengajukan teori yang menegaskan bahwa ulama' memiliki peranan yang besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Merujuk pada argument Tom Pires, ia membedakan pedagang Muslim dan Mullah (ulama') yang pertama datang ke Indonesia untuk berdagang dan mengumpulkan kekayaan. Setelah mereka menetap, datanglah guru-guru (ulama') yang bertujuan menyebarkan dan mengajar penduduk setempat.<sup>3</sup> Dengan demikian, kehadiran para pedagang Muslim melahirkan kota-kota perdagangan sebagai pusat ekonomi yang akhirnya mendukung kegiatan bagi pengembangan Islam dan memungkinkan terselenggaranya pembangunan masjid, pusat-pusat pengajaran Islam dan kegiatan-kegiatan Islam.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, pendidikan mendapat posisi yang sangat penting dan tinggi karenanya, umat Islam selalu mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan untuk kepentingan masa depan umat Islam. Sejak awal perkembangan Islam,

<sup>1</sup> Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya Dpk pada STIT Raden Wijaya Mojokerto

<sup>2</sup> Azyumardi Azra(Ed.), *Prespektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), xviii.

<sup>3</sup> O.Robson, "Java the Crossroads: Aspects of Javanese Cultural History in the 14 th" dalam BKI (Martinus Nijhoff, 1981), 227.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Prespektif*,xiv.

pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Selain karena besarnya arti pendidikan, kepentingan Islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam kendati dalam system yang sederhana seperti halaqah yang dilakukan di mesjid, musalla bahkan rumah-rumah ulama'.

Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan social yang sudah ada (*indigeneous religious and social institution*) ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren. Menurut Manfred, pesantren berasal dari masa sebelum Islam dan mempunyai kesamaan dengan Budha dalam bentuk asrama. Sejak pertengahan abad ke-9, Islam telah masuk ke kepulauan Asia Tenggara dan pendidikan agama melembaga berabad-abad berkembang secara paralel.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tentang arti kata pesantren. Di kalangan santri yang mendapat imbuhan "pe-an" yang berarti tempat tinggal santri. Sedangkan istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. <sup>6</sup> Robson mengemukakan asal bahasa sama dengan asal kata "sattiri" yang artinya orang yang tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan secara umum. Berbicara mengenai akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Karena Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia.<sup>7</sup> Pada abad ke-15 M, pesantren didirikan oleh para penyebar agama Islam diantaranya Wali Songo. Untuk menyebarkan agama Islam mereka mendirikan mesjid dan asrama untuk santri. Dalam Babad Tanah Djawi, di Ampel Denta telah mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat ngelmu atau ngaos pemuda Islam. Sunan Giri setelah ngelmu kepada Sunan Ampel mendirikan lembaga Pendidikan di Giri.<sup>8</sup>

Madrasah adalah salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam<sup>9</sup> bukan asli Indonesia<sup>10</sup> sebagai perkembangan dari masjid yang memiliki sejarah panjang dimana dalam masjid terdapat halaqah-halaqah yang mana tiap-tiap halaqah terdapat guru yang menjelaskan pelajaran dan perdebatan dengan murid sehingga terjadi kebisingan yang mengganggu orang ibadah. <sup>11</sup>Banyaknya murid yang datang dari luar kota dan minimnya uang yang dimiliki menuntut dibangunnya pemondokan atau asrama disamping masjid yang kemudian menjadi madrasah.<sup>12</sup> Di Indonesia<sup>13</sup>, Madrasah bertujuan memenuhi

<sup>5</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Butche B. Soendjojo (Jakarta: P3M, 1983), 17.

<sup>6</sup>Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta:LP3ES,1982),18.

<sup>7</sup> Amin Haedari, *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab*, vol. II No. 1 Juli 2007,34.

<sup>8</sup> TP, *Babad Tanah Djawi* (Holland: Foris Publication,1987),20.

<sup>9</sup> Dalam khazanah pendidikan Islam terdapat sejumlah istilah yang merujuk langsung pada pengertian pendidikan dan pengajaran seperti tarbiyah,ta'dib, ta'lim, tabyin dan tadrīs. Lihat di Maksum, *Madrasah : Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999),11. Madrasah berbeda dengan lembaga pendidikan sebelumnya. Madrasah memiliki administrasi yang teratur dan rapi. Philip K.Hitti menggolongkan ke dalam institution of higher education setaraf dengan akademi sedangkan Charles Michael Stanton mengelompokkan madrasah sebagai lembaga pendidikan tingkat college Lihat : Stanton *Higher Learning in Islam: The Classical Period, AD 700-1300*, (Maryland: Rowman and Littlefield Inc.,1990),37-38.

<sup>10</sup> Madrasah berasal dari dunia Islam di Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 atau 11M sebagai lembaga pendidikan tradisional dan symbol kebangkitan golongan Sunni dan sarana transmisi ajaran-ajaran golongan Sunni Lihat: Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 192.

<sup>11</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 106.

<sup>12</sup> Setiap madrasah dilengkapi aula besar. Ada perbedaan esensial antara masjid dan madrasah. Masjid sebagai bangunan waqaf bebas dari control pendirinya sedangkan madrasah dibawah control

kebutuhan modernisasi pendidikan Islam dengan mengintrodusir system klasikal, perjenjangan, penggunaan bangku bahkan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya dan menunjukkan perbedaan antara lembaga pendidikan Islam modern dengan lembaga pendidikan Islam tradisional dan system pendidikan Belanda yang sekuler. Hal ini menunjukkan fenomena modern dalam system pendidikan Islam Indonesia.

Sulit sekali memastikan kapan tepatnya istilah “madrasah” dipakai di Indonesia dan pertama kali didirikan. Tim Penyusun DEPAG RI. Menetapkan madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah dengan nama resmi Adabiyah School di Padang (sumatera Barat) yang didirikan oleh syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 dan pada tahun 1915 dirubah menjadi HIS Adabiyah.<sup>14</sup> Pada tahun 1910 di Padang, didirikan sekolah agama dengan nama Madras School dan pada tahun 1923 berganti nama menjadi Diniyah School.<sup>15</sup>

Menurut Karel A Steenbrink berpendapat boleh jadi Jam’iyat Kahair yang pertama memakai istilah “madrasah” sebagai organisasi persatuan orang-orang Arab yang ada di Indonesia dengan mendatangkan guru dan alat-alat sekolah dari Timur Tengah dengan system pendidikan seperti Mesir dan Tunisia<sup>16</sup>.

Madrasah ditempatkan di samping masjid dan pesantren. Di Jawa mulai berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam pada tahun 1912<sup>17</sup> pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan Islam itu sendiri dalam pengertian umum muncul dan berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri yakni berawal dari pendidikan informal berupa dakwah Islamiyah dan diselenggarakan di rumah-rumah yang di kenal dengan *Dar al Arqam*, kemudian di masjid (halaqah) seiring dengan terbentuknya masyarakat Islam. Beberapa tahun kemudian, istilah “madrasah” dipakai untuk sekolah agama Islam oleh organisasi pendidikan Islam di Indonesia.

pendirinya bahkan selanjutnya diteruskan oleh keturunannya. Lihat George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinbrugh University Press,1981),27-28. Sejarah munculnya madrasah di dunia Islam ulama’ berbeda pendapat diantaranya Syalabi madrasah yang mula-mula muncul adalah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizham al Mulk dinasti Saljuk pada tahun 1065-67. Lihat Philip K Hitti, *History of the Arab* (London : Mac Millan Press Ltd,1974), 410. Sedangkan Athiah al Abrasyi mengemukakan madrasah al Baihaqiyah adalah madrasah pertama yang didirikan pada akhir abad 4 Lihat : Athiyah al Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* terjemahan Bustami A.Gani dan Djohar Basri L.I.S.,Cet.ke 7 (Jakarta:Bulan Bintang, 1993),79.

<sup>13</sup>Terjadi perbedaan pendapat tentang kepastian kapan dan dimana Islam dating di Indonesia. Tentang kapan Islam datang di Indonesia kebanyakan memperkirakan kontak Indonesia dengan Islam terjadi sejak abad ke 7. Hubungan tersebut tergambar dalam al Qur’an surah Ali Imran ayat 5-6 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.” Yaitu mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.”Menurut Karel Steenbrink, kata “kafur” secara pasti bukan istilah Arab yang akar kata “kafara” bisa berarti menghindari atau berterima kasih. Kata “kufur” berasal dari Melayu yang berarti kapur barus atau kamper. Jadi, kata “Kafur” bukan hanya penghubung secara etimologis antara al Quran dan Nusantara, tetapi juga komoditi yang sejak abad 7 telah dibawa oleh Muslim dari Nusantara.Lihat : Karel Steenbrink, *“Qur’an Interpretations of Hamzah Fansuri (CA.1600) and Hamka (1908-1982):A Comparison”*,1994),1.

<sup>14</sup>DEPAG RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta:Dirjen Binbaga,1986),70.

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta:Mutiara Sumber Widya,1992),63-64.

<sup>16</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam kurun Modern* (Jakarta: LP3es,1974),61-62.

<sup>17</sup><http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/pendidikan/3770-apa-arti-madrasah-bagi-indonesia.html>

Meskipun madrasah pernah berkembang pada abad 11 dan 12, atau periode pertengahan sejarah Islam, khususnya di wilayah Baghdad seperti madrasah al Nizamiyah, kehadiran madrasah di Indonesia tampaknya merupakan fenomena modern pada awal abad 20<sup>18</sup>. Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan ini merupakan lembaga madrasah Timur Tengah masa modern atau bahkan merupakan -lembaga persekolahan- karena pengaruh pendidikan Barat- yang diisi secara dominan dengan kurikulum keagamaan. Meskipun demikian, karena pengaruh politik penjajah, sekolah dan madrasah dipandang sebagai dua bentuk lembaga pendidikan yang berbeda secara dikotomis: sekolah bersifat sekuler dan madrasah bersifat Islami. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan madrasah di Indonesia mengalami konflik pada awal kemerdekaan yaitu di satu pihak pemerintah ingin menjadikannya sebagai lembaga pendidikan nasional dengan memberi muatan-muatan non keagamaan sedangkan dilain pihak kalangan madrasah merasa khawatir akan fungsi pendidikan keagamaannya jika madrasah dimasukkan ke dalam jajaran pendidikan nasional.

## **Karakteristik Pendidikan Islam**

### **1. Kehidupan Murid**

Belajar di tingkat dasar tidak ditentukan lamanya melainkan bergantung kepada kemampuan anak. Ciri utama kehidupan murid sekolah dasar adalah kewajiban membaca dan menulis. Bahan pengajaran berupa syair-syair, bukan al Qur'an karena dikhawatirkan membuat kesalahan yang akan menodai kemuliaan al Qur'an. Murid - murid tidak hanya diajarkan al Qur'an namun juga menghafalkannya bahkan barang siapa yang mampu menghafal dalam waktu yang lebih cepat akan diberi keistimewaan dengan diperbolehkan berlibur dan barang siapa yang lulus dengan hasil gemilang akan dikirap dengan naik unta dan dilempari buah almond sepanjang jalan.<sup>19</sup>

Guru bisa meminta gaji dari murid-muridnya yang jumlahnya bergantung pada kemampuan orang tua murid namun ada juga sekolah yang tidak memugut gaji kepada murid-muridnya karena pembiayaan diperoleh dari harta wakaf yaitu kuttab al sabil.<sup>20</sup>

Hubungan guru dan murid pada pendidikan tingkat dasar seperti hubungan orang tua dan anak. Guru mengajar dengan lemah lembut begitu pula menegurnya jika murid melakukan kesalahan dan akan melakukan kekerasan jika guru tidak dapat menguasai keadaan.<sup>21</sup> Disamping memperhatikan tingkah laku murid, guru juga memperhatikan kemampuan murid dalam belajar dan memberikan petunjuk tentang pelajaran yang cocok bagi murid<sup>22</sup>

### **2. Metode Pembelajaran**

Di antar ciri khas pendidikan Islam pada masa klasik adalah teacher oriented bukan institution oriented. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan bergantung pada guru bukan kepada lembaga.<sup>23</sup>

Dalam proses belajar-mengajar, metode pengajaran merupakan salah satu aspek pengajaran yang penting untuk mentransfer pengetahuan atau kebudayaan dari seorang guru kepada para pelajar. Melalui metode pengajaran terjadi proses internalisasi dan

<sup>18</sup> George Makdisi, *Muslim Institution of Learning in Eleventh-Century of Baghdad* (tt:tp:1961), 1-56 tentang sejarah madrasah pada abad pertengahan. Lihat: Mahmud Yunus, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta:Hidakarya Agung,1985),17.

<sup>19</sup> Philip K Hitti, *History of The Arab*,(London:Macmillan Press Ltd,1974), 408.

<sup>20</sup> Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al Husna, 1992), 112.

<sup>21</sup> Ibid, 162-167.

<sup>22</sup>Ahmad Syalabi,*Sejarah*, 298.

<sup>23</sup> Richard W Bulliet,*The Patrician of Nishapur: a Study in Medieval Islamic Social Histoty* (Harvard: Harvard University Press, 1972), 52.

pemilikan ilmu oleh pelajar sehingga dapat menyep apa yang telah disampaikan dan memilikinya.

Pada masa klasik metode pengajaran dikelompokkan kedalam dua macam yaitu lisan,<sup>24</sup> hafalan dan tulisan. Metode lisan meliputi dikte, ceramah, qiraah dan diskusi. Dikte (imla') adalah metode menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena ada catatan yang sangat membantu terutama bagi pelajar yang kurang kuat daya ingatnya dan buku cetakan masih sulit ditemui. Metode ceramah disebut metode al sama' karena guru menjelaskan materi dan murid mendengarkannya.

Metode menghafal merupakan ciri umum dalam sistem pendidikan Islam masa ini. sebagaimana Imam Hanafi mengatakan seorang murid harus membaca berulang kali dan terus menerus mengulangnya sampai menghafalnya.<sup>25</sup> Metode ini bisa bersifat pasif jika murid hanya sekedar menghafal tanpa diikuti pemahaman dan kemampuan mengkontekstualisasi.

Metode tulisan dianggap sebagai metode yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Metode tulisan merupakan pengkopian karya-karya ulama' yang ditulis kembali oleh guru lalu membacakannya dan murid-murid menulis dan menyodorkan tulisannya kepada guru untuk di sahkan.<sup>26</sup>

Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam, baik dari segi teoritis maupun pelaksanaannya, merupakan bagian dari kebudayaan. Karena itu, rumusan yang mutlak mengenai pendidikan akan sulit ditemukan dan tidak mungkin diterima, mengingat kebudayaan sangat beragam. Sementara, kebudayaan sendiri akan sangat dipengaruhi oleh ideology hidup yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Oleh sebab itu sekalipun unsur-unsur formal teknis setiap system pendidikan tersebut sama yaitu meliputi filsafat pendidikan Islam<sup>27</sup>, tujuan pendidikan, kurikulum, metode mengajar, manajemen pengajaran, manajemen pendidikan dan sebagainya namun hakikat, corak dan muatannya berbeda sesuai perbedaan ajaran atau ideology yang dianut masyarakatnya.<sup>28</sup>

Masyarakat Muslim memiliki aqidah dan kebudayaan yang bersumber kepada al Qur'an dan al Sunnah. Al Qur'an dan al Sunnah mengandung penjelasan mengenai ajaran tauhid sebagai centralnya. Diantara pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan usaha-usaha pendidikan adalah kajian tentang alam semesta, manusia dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka konsep dasar pendidikan Islam pun mesti bertumpu pada unsur-unsur utama yang menjadi landasan aqidahnya sendiri yang mana semua konsep harus merujuk kepadanya.<sup>29</sup> Hal ini dapat dipahami dari momen kehadiran Islam. Islam hadir pada saat umat manusia diliputi suasana yang tidak menentu karena jauh dari ajaran tauhid.

Gambaran situasi tempat turunnya Islam ketika itu adalah pertama adanya pertentangan yang keras dan potensial untuk peperangan antara penganut Yahudi dan Nasrani. Kedua, sengketa yang cukup sengit antara sekte-sekte dalam Nasrani. Ketiga, pertentangan antara penyembah berhala dan penganut kedua agama ahlul kitab. <sup>30</sup>Dengan demikian, pendidikan Islam dipandu oleh sumber yang jelas dan transenden yaitu wahyu

<sup>24</sup>Hanun Asrohan, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1999),77.

<sup>25</sup> George Maksidi, *The Rise Coeges Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh:Edinburgh University Press, 1981), 104.

<sup>26</sup>Hal ini seperti metode pemberian ijazah pada masa klasik. Selain berfungsi untuk member izin bagi seorang murid untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ijazah juga memberikan bukti bahwa suatu catatan/teks buku telah dia pelajari dihadapan gurunya dan hasil turunan dari buku yang dikarang oleh gurunya. Lihat : Ahmad Syalabi, *Sejarah*, 259.

<sup>27</sup>Perbedaan Filsafat pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Umum.

<sup>28</sup>Hasan 'Abu al-Al, *al Tarbiyah al Islamiyah fi al Qarn al Rabi' al Hijri* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1978), 14. dan Majid Irsan al Kailani, *Falsafah al Tarbiyah al Islamiyah* (Makkah : Maktabat al Hadi, 1987), 25.

<sup>29</sup> Muhammad Jamil Khayyat, *al Nazariyyah al Tarbawiyah fi al Islam*, (Makalah alsafa, 1986), 78.

<sup>30</sup> Abd al Ghani, 'Abud, *Dirasat Muqaranat li Tarikh al Tarbiyah* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi,1987), 237.

yang berarti tidak diserahkan pada pengalaman manusia semata, apalagi kepada spekulasi manusia sebagaimana pendidikan sekuler. Namun demikian, selain berdasar pada al Qur'an dan al Sunnah, pendidikan Islam juga berorientasi kepada masyarakat.<sup>31</sup> Hal ini dikaitkan dengan esensi ajaran Islam sendiri yaitu rahmatan li al alamin. Dijadikannya masyarakat sebagai dasar, menunjukkan karakter ajaran Islam yang fleksibel sehingga dapat berlaku pada setiap tempat dan di setiap waktu. Disisi lain, kenyataan itu memberikan kemungkinan timbulnya konsep pendidikan Islam yang beragam. Jadi, dalam lingkup masyarakat Muslimum, konsep pendidikan Islam bersifat relatif, apalagi jika dilihat secara pragmatis dalam aplikasi konsep Islam yang beragam.

Berdasar pada paparan di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa karakteristik pendidikan Islam pada dasarnya dapat dilihat dua sisi pertama, aspek-aspek fundamental yang menggambarkan dasar dan tujuan pendidikan Islam sehingga membedakan dengan pendidikan non Islam. *Kedua* kandungan utama pendidikan Islam yang menjadi substansi untuk dikembangkan dalam kurikulumnya.<sup>32</sup>

## Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Islam

### 1. Pendidikan Islam adalah bagian dari proses rububiyah Tuhan

Al Qur'an menggambarkan bahwa Allah adalah *al Khaliq* (pencipta) dan *rab al alamin* (pemelihara semesta alam). Dalam proses pemeliharaan, Tuhan juga mematuhi sunnatullah. Tuhan mengurus, memelihara, dan menumbuhkembangkan alam secara bertahap dan berangsur-angsur (*murabbi*). Hal ini disesuaikan dengan kadar pemikiran manusia sehingga dapat dijadikan pendidikan baginya

Peranan manusia dalam pendidikan secara teologis dimungkinkan karena posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan dijadikannya khalifatullah fi ard yang mengaplikasikan bahwa manusia secara potensial memiliki sejumlah kemampuan yang diperlukan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Tuhan sebagaimana al Qur'an surah al An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al An'am 165)*

Pendidikan Islam adalah keseluruhan dari proses dan fungsi rububiyah Tuhan terhadap manusia sejak dari penciptaan hingga pertumbuhan sempurna secara bertahap baik dalam aspek akal, kejiwaan maupun jasmaninya. Selanjutnya manusia bertanggung jawab untuk merealisasikan proses pendidikan Islam dalam kehidupan nyata.

### 2. Pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya

Dalam pandangan al Qur'an dan al hadith, manusia yang lengkap terdiri dari jasmani dan rohani, unsur jiwa dan akal., unsur *nafs* dan *qalb*. Pendidikan Islam tidak bersifat dikotomis dalam menangani unsur-unsur tersebut dengan menganggap lemah atau mengunggulkan yang satu atas yang lainnya. Pendidikan Islam memandang bahwa semua unsur adalah potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan sebagai usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi menjadi kesempurnaan actual melalui setiap tahapan hidupnya. Fungsi pendidikan Islam adalah untuk menjaga keutuhan unsur-unsur individual anak didiknya dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah swt. Adapun

<sup>31</sup> Ibid.,

<sup>32</sup> Maksum, *Madrasah*, 48

objeknya adalah manusia yang mendapat kewajiban menuntut ilmu sebagai kewajiban inheren dengan tugasnya sebagai khalifah dan 'abd.<sup>33</sup>

### 3. Pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama

Pengajaran agama bukan pada kedudukan teknisnya sebagai suatu disiplin ilmu melainkan dalam rangka pencerdasan manusia dan penanaman nilai dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>34</sup>

### 4. Pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka

Islam mengakui adanya perbedaan antara manusia satu dan lainnya dan perbedaan hakiki ditentukan amal perbuatannya<sup>35</sup> dan ketaqwaannya.<sup>36</sup> Karena itu pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis dan universal. Keterbukaan ini juga ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsure-unsur positif dari luar sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang original yang bersumber pada al Qur'an dan al Hadith.<sup>37</sup>

## Pokok-Pokok Kandungan Pendidikan Islam

### 1. Aqidah tauhid

Selain menunjukkan posisi penting dalam diri manusia, fitrah bertauhid merupakan unsur<sup>38</sup> original yang melekat sejak penciptaannya selain menunjukkan posisi penting fitrah dalam diri manusia.

### 2. Manusia

Islam telah memberi gambaran yang jelas tentang manusia. Manusia dalam pandangan Allah adalah makhluk yang sempurna<sup>39</sup> sebagaimana dikisahkan dalam al Qur'an tentang sujudnya malaikat kepada Adam<sup>40</sup>. Akan tetapi manusia juga memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang paling rendah<sup>41</sup> bahkan lebih rendah dari binatang<sup>42</sup>. Jadi manusia memiliki kedua potensi baik dan buruk sekaligus yang akan menentukan kedudukan manusia sebagaimana ia menentukan pilihan.<sup>43</sup> Manusia dalam pandangan Islam memiliki dua peran utama yaitu khalifatullah<sup>44</sup> dan 'abd<sup>45</sup>. Hal ini sejalan dengan dua tahap kehidupan yaitu dunia dan akhirat.<sup>46</sup>

### 3. Masyarakat

<sup>33</sup> Ibid., 54.

<sup>34</sup> Sayyid Muhammad al Naquib al Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1992), 65-74.

<sup>35</sup> Lihat al-Qur'an, 67(al Mulk):2.

<sup>36</sup> Al Qur'an, 49 (al Hujurat):13.

<sup>37</sup> Abd al Ghani 'Abud, *Dirasat Muqaranat li Tarikh al Tarbiyah* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1987), 203.

<sup>38</sup> Lihat al Qur'an, 30 (al Rum): 30 yang berbunyi :Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia untuk tidak mengetahui. Dan hadith riwayat al shaykhani

كل مولود يولد على الفطرة

Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah

<sup>39</sup> al Qur'an, 95( al Tin): 4

<sup>40</sup> al Qur'an, 2 (al Baqarah): 31

<sup>41</sup> al Qur'an, 95(al Tin): 5

<sup>42</sup> al Qur'an, 7(al A'raf): 179

<sup>43</sup> Hasan Abd al 'Al, *al Tarbiyah al Islamiyah fi al Qarn al Rabi' al Hijri* (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1978), 42.

<sup>44</sup> al Qur'an, 2 (al Baqarah): 30

<sup>45</sup> al Qur'an, 51 (al Dariyat): 56

<sup>46</sup> al Razy, *Ajaib al Qur'an* (Beirut : Dar al Fikr al Ilmiyah 1282 H), 45

Masyarakat dalam pandangan Islam dilihat dalam prinsip persamaan (*al Musawah*)<sup>47</sup>. Hal ini membebaskan manusia dari penghambaan antara satu dengan yang lain.<sup>48</sup> Semua tata hubungan dalam masyarakat berdasarkan prinsip persamaan, tauhid dan kesetiakawanan social diarahkan oleh ajaran dan masuk dalam lingkup ibadah.

#### 4. Alam semesta

Menurut Islam, Tuhan adalah Esa dalam esensi, sifat dan perbuatannya. Alam semesta diciptakan Allah bukan tanpa tujuan<sup>49</sup> Di satu sisi penciptaan alam adalah untuk kepentingan manusia dengan mendayagunakan secara optimal dan berusaha mengenalinya melalui ilmu pengetahuan<sup>50</sup> namun disisi lain manusia dituntut untuk menjaga kesatuan dan keserasiannya dengan memberikan peringatan akan kerusakan ekosistem yang disebabkan perbuatan manusia.<sup>51</sup> Islam mengajarkan bahwa alam semesta bukan sesuatu yang statis melainkan memiliki potensi untuk berubah dan bertambah<sup>52</sup> Dengan demikian pencarian dan penguasaan terhadap ilmu tidak boleh berakhir.

#### 5. Ilmu pengetahuan

Majid Irsan al Kailani membagi ibadah dalam tiga bentuk yang saling berkaitan yaitu ibadah ritual, ibadah social dan ibadah kealaman<sup>53</sup>. Berdasar pada ketiga cakupan ibadah, maka dapat ditegaskan dengan pasti bahwa tidak ada pemisahan antara al din (agama) dan al ilm (ilmu). Jadi, tidak ada pemisahan antara apa yang disebut ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah islami sepanjang berada dalam batas-batas yang digariskan Allah kepada kita.<sup>54</sup> Allah yang menjamin akan memelihara kemurnian Al-Qur'an, kelanggengan Islam dan keunggulannya terhadap seluruh agama lain.

#### Faktor-faktor Yang Mendukung Keberhasilan Madrasah<sup>55</sup>

1. Iman yang tak tergoyahkan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk merubah masyarakat, membentuk pemimpin dan mewujudkan cita-cita. Hasan Al Banna yakin pula bahwa pendidikan itu satu-satunya jalan yang dapat menyampaikannya kepada tujuan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi saw. untuk membentuk generasi teladan yang diridhai Allah.
2. Rencana pendidikan mempunyai tujuan tertentu, langkah-langkah yang jelas, sumber yang terang, bagian-bagian yang saling mendukung, dengan sistem beraneka ragam dan ditegaskan atas filsafat yang jelas, digali dari ajaran Islam bukan dari ajaran lainnya.
3. Suasana kebersamaan yang positif, yang dibina oleh jamaah. Hal itu akan membantu setiap anggotanya untuk hidup secara Islam, melalui sugesti, contoh teladan, persamaan perasaan dan tindakan. Manusia menjadi lemah bila menyendiri dan menjadi kuat dengan jamaahnya. Jamaah merupakan kekuatan untuk menegakkan kebaikan dan ketaatan serta merupakan perisai terhadap kejahatan dan maksiat.

<sup>47</sup>al Qur'an, 4 (al Nisa'):1

<sup>48</sup>al Qur'an, 19 (al Maryam): 93

<sup>49</sup>al Qur'an, 44 (al Dukhan): 38-39

<sup>50</sup>al Qur'an, 3 (Ali Imran): 190-191

<sup>51</sup>al Qur'an, 30 (al Rum): 41

<sup>52</sup>al Qur'an, 35 (al Fatir):1

<sup>53</sup>Majid Irsan al Kailani, *Falsafah*, 85 menjelaskan ibadah ritual berkaitan hubungan individu dengan Tuhannya. Ibadah social berkaitan hubungan individu dengan individu lainnya sedangkan ibadah alamiah berkaitan hubungan individu dengan alamnya.

<sup>54</sup>Muhammad Munir Mursi, *al Tarbiyah al Islamiyah, Usuluha wa Tatawuruha fi al Bilad al Arabiyah* (Kairo: Dar al Ma'arif, 1987), 17

<sup>55</sup> <http://www.walikhwan.net/pendidikan.islam-dan-hasan-albanna>



4. Pemimpin yang mendidik dengan bakat, ilmu dan pengalamannya yang dianugerahkan kepadanya kekuatan iman yang luar biasa, membekas pada setiap hati orang yang berhubungan dengannya, melimpah dari hatinya ke hati orang-orang di sekitarnya.
5. Pendidik yang ikhlas, kuat dan terpercaya yang meyakini jalan yang dibentangkan oleh pimpinan. Mereka mempunyai pengaruh terhadap murid-muridnya dan mereka ini menjadi pendidik-pendidik bagi generasi sesudahnya, demikianlah seterusnya.

### Keunikan Madrasah

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Madrasah memiliki keunikan sebagai berikut:

1. Keunikan madrasah diawali dengan hampir terbesar jumlah madrasah adalah milik swasta. Berbeda halnya dengan sekolah di lingkungan Diknas. Pada tingkat sekolah dasar, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri hanya 4,8% dibanding dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang berjumlah 95,2%. Keadaan ini terbalik dengan Sekolah Dasar Negeri berjumlah 93,11% dan Sekolah Dasar Swasta 6,89%.<sup>56</sup>

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang populis, yang ditampakkan dengan tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakatlah yang membentuk, membina dan mengembangkannya. Oleh karena itu dari segi kuantitas perkembangannya sangat pesat, namun dari segi kualitas perkembangannya sangat lambat. Konsekuensi madrasah yang bersifat populis yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam.

Keterikatan masyarakat terhadap madrasah sepanjang sejarah pendidikan Islam di Indonesia lebih ditampakkan sebagai "ikatan emosional" yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemunya dua kepentingan yaitu pertama; hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan (meningkatkan pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya) dan kedua; motivasi keagamaan (keinginan agar anak-anak mendapat pendidikan agama yang cukup) di samping pendidikan umum. Kuatnya ikatan emosional masyarakat ini telah menyebabkan madrasah menjadi lebih pasif, lebih populis dan lebih mencerminkan suatu gerakan masyarakat karena itu madrasah lebih banyak di pedesaan dan daerah pinggiran, lebih dimotivasi secara intrinsik bahwa belajar itu sebagai suatu kewajiban dan lebih tanpa pamrih atau dengan kata lain "lillahi ta'allah" dan hampir semua pesantren di Indonesia ini dalam mengembangkan pendidikan kepesantrenannya berkiblat pada ajaran Walisongo. Misal pondok pesantren Nahdlatul Wathan di Pancor Lombok Timur NTB yang saat ini santrinya lebih dari sepuluh ribu orang<sup>57</sup> dan pondok pesantren yang lainnya yang tersebar di Pulau Jawa. Sedangkan Maksum menyebutkan bahwa akar sejarah atau asal usul lembaga pendidikan Islam misal madrasah adalah merupakan prestasi abad kelima Hijriyah. Madrasah-madrasah yang timbul dalam Islam, tidak dikenal pada masa-masa sahabat dan melainkan sesuatu yang baru setelah 400 tahun sesudah Hijriyah<sup>58</sup>

Motivasi agama ini didukung pula oleh ajaran wakaf<sup>59</sup> yang memberi dorongan bahwa tanah/sarana yang telah diwakafkan akan terus mengalir amalnya, walaupun yang

<sup>56</sup> <http://www.blogger.com/feeds/35417963/posts/default>

<sup>57</sup> Mas'ud Abdurrahman; *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 4.

<sup>58</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : PT Logas Wacana Ilmu, 1999), 60.

<sup>59</sup> Dalam system pendidikan Islam mempunyai hubungan erat dengan wakaf sebagai sumber keuangan sehingga proses pendidikan berlangsung dengan baik dan lancar. Harta wakaf bisa berupa tanah pertanian, toko, kebun, tempat mandi dan sebagainya. Walaupun harta wakaf diserahkan untuk dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan, pengelolaan benda wakaf tidak langsung ditangani oleh lembaga yang bersangkutan namun dikelola secara formal oleh orang yang ditunjuk mengurusinya. Harta wakaf diserahkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan didampingi saksi. Dokumen tersebut menerangkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola harta wakaf dan untuk apa benda wakaf dimanfaatkan. Dalam dokumen juga disebutkan siapa yang mengawasi harta wakaf.

bersangkutan telah meninggal dunia..Hampir seluruh tanah madrasah adalah wakaf. Keterikatan emosional ini disatu sisi merupakan potensi dan kekuatan bagi madrasah dalam arti rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*) masyarakat yang tinggi. Hal ini juga dapat menjadi faktor penting untuk menjamin sustainabilitas (kelangsungan hidup) madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang populis. Tapi di pihak lain, ia dapat menjadi kendala karena merasa sebagai pemilik dan sebagai pendiri yang membina madrasah semenjak awal, sebagian masyarakat mungkin tidak akan begitu mudah menerima ide-ide reformasi yang diluncurkan dari atas. Misalnya masyarakat dan atau yayasan merasa tidak mampu lagi membina sekolah dengan baik karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan manajemen. Dengan kata lain setiap reformasi madrasah akan berjalan lamban.

2. Jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki. Keadaan terbalik pada sekolah umum, siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan. Pada madrasah Ibtidaiyah, jumlah murid perempuan 52% dan murid laki-laki 48%, sedangkan di Sekolah Dasar, murid perempuan 48% dan murid laki-laki 52%. Keadaan ini memberi makna (berdasarkan wawancara konsultan ADB dan BEP dengan para orang tua) bahwa orang tua yang menyekolahkan anak perempuannya di madrasah merasa "aman" dalam arti "moral". Ini memberi petunjuk dalam pandangan para orang tua madrasah masih dianggap sebagai "benteng moral". Namun sayangnya madrasah belum menjanjikan peluang yang lebih luas untuk lapangan kerja. Dengan demikian menurut persepsi masyarakat, bahwa madrasah mempunyai kelebihan dalam bidang pendidikan akhlak/moral, namun lemah dalam bidang pengetahuan umum
3. Lokasi madrasah yang kebanyakan berada di daerah pinggiran, pedesaan, daerah terpencil, daerah miskin dan tertinggal. Ini sesuai dengan akar sejarah madrasah yang lahir dari inisiatif masyarakat di mana mereka tidak mampu mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang letaknya jauh dan sekolah dengan bayaran "mahal". Juga karena faktor ekonomis di mana anak harus membantu orang tua dalam mencari nafkah (dalam hal ini madrasah memberi alternatif pendidikan sore/malam). Dana yang dapat dikumpulkan masyarakat muslim dalam pengembangan madrasah sangat terbatas, sementara biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan madrasah ketinggalan terus. Pada umumnya madrasah swasta berada dalam keadaan serba kekurangan karena menampung siswa-siswa dari keluarga ekonomi lemah. Akibatnya biaya untuk menunjang proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas dan teknologi tidak dapat dilaksanakan. (Data Emis 2001 menunjukkan alokasi dana untuk proses belajar mengajar di madrasah hanya 5,6% , dana terbesar pada gaji dan honor serta pemeliharaan) hal ini pula yang menyebabkan kualitas siswa madrasah tetap tertinggal.
4. Keanekaragaman madrasah baik dari segi jenis pendidikan, penyebaran maupun kualitasnya. Keanekaragaman madrasah tampak dalam berbagai program yang muncul seperti pada Madrasah Aliyah ada program keagamaan, program ketrampilan, program kejuruan di samping madrasah dengan program sekolah umum yang berciri khas Islam. Dari aspek penyelenggara, maka ada madrasah yang bernaung dalam organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan lain-lain. Juga ada yang merupakan milik keluarga, milik perorangan atau yayasan. Juga ada yang menjadi bagian dari pondok pesantren. Dari aspek kualitas sangat beragam pula, dari yang berkualitas sekedarnya sampai yang berkualitas unggul.

---

Lihat : Charles Michael Stanton, *Higher Learning in Islam* (Maryland:Rowman and Little field Inc, 1990), 35.

### **Integrasi Pendidikan Islam ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pada awal perkembangannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan madrasah sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945. BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) merumuskan dan menetapkan bahwa Madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, dan mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah<sup>60</sup>

Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 04 tahun 1950 pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar dengan syarat telah terdaftar di Kementrian Agama dan memberikan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok disamping mata pelajaran umum.<sup>61</sup>

Secara konstitusional, negara Indonesia berdasarkan pada agama. Pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, pendidikan tidak boleh menyimpang dari tujuan pendidikan nasional<sup>62</sup> yaitu Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.<sup>63</sup> Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan potensi nasional untuk pembangunan fisik materiil bangsa Indonesia.

Secara historis, pesantren telah “mendokumentasikan” berbagai sejarah bangsa baik social budaya masyarakat Islam, politik maupun ekonomi karena pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia. Taufik Abdullah mencatat pesantren sebagai pusat pemikiran keagamaan.<sup>64</sup> dan lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dari masa pra Islam.<sup>65</sup> dan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat sekitarnya.<sup>66</sup> Menurut Azyumardi Azra, pesantren menunjukkan sikap kolot dalam merespon upaya modernisasi.<sup>67</sup> Hal ini karena para eksponen cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan dan tidak tergesa-gesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga modern sepenuhnya tetapi menerimanya dalam skala terbatas sebatas melakukan penyesuaian yang mendukung kontinuitas seperti system penjenjangan, kurikulum lebih jelas dan system klasikal.<sup>68</sup>

Mr.R Soewandi sebagai Menteri PP dan K membentuk panitia penyidik pengajaran RI yang diketuai Ki Hajar Dewantoro tertanggal 02 Juni 1946 menetapkan pengajaran yang

<sup>60</sup> Depag.RI,*Sejarah*, 77.

<sup>61</sup>Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), 19.

<sup>62</sup> Depag RI,, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986), 22-23.

<sup>63</sup>TAP MPR Nomor II Tahun 1983 tentang GBHN.

<sup>64</sup>Taufik Abdullah,*Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), 112.

<sup>65</sup>Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1995), 24.

<sup>66</sup>Dawam Rahardjo, *Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan* dalam Dawam Rahardjo (Ed.) *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995), 9-10.

<sup>67</sup> Azyumardi Azra, *Pesantren Kontinuitas dan PerubahanI*, Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), xiv.

<sup>68</sup> Ibid.,

bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu di pertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain. Keputusan ini sesuai dengan keputusan BPKNIP pada akhir tahun 1945.<sup>69</sup> Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya semenjak K.H.A.Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau melakukan pembaharuan pendidikan Agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama No.03 tahun 1950 dengan menginstruksikan pemberian pelajaran umum di Madrasah dan pelajaran agama di sekolah umum. Dengan demikian pesantren semakin membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum bahkan mendirikan sekolah umum seperti pesantren tebuireng yang mendirikan SMP dan SMA.<sup>70</sup>

Perkembangan madrasah sejak tahun 1970-an jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Peningkatan Mutu Madrasah yang bertujuan agar madrasah memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam system pendidikan nasional.<sup>71</sup> Sebagai tindak lanjutnya adalah surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 9299/U/1984 no 45 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan kurikulum Madrasah. Setelah ditetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu bab VI pasal 17 dan 18 , maka kedudukan madrasah semakin kuat karena secara tegas posisinya disebut sejajar dengan sekolah umum yang sederajat. Kedudukan secara formal yang ditetapkan sederajat sebagai produk kebijakan politik pendidikan pemerintah, tentu belum sepenuhnya dapat mendongkrak wibawa akademik madrasah sampai saat ini seperti munculnya opini bahwa madrasah adalah second class. Oleh karena itu madrasah harus membenahi diri mengejar ketertinggalannya dalam penguasaan pengetahuan umum di sekolah umum dengan tetap memberikan perhatian yang memadai dalam penguasaan pengetahuan agama.

Salah satu factor yang menyebabkannya adalah tidak seimbangannya ilmu-ilmu agama (*al ulum al diniyah*) dan ilmu-ilmu dunia (*al ulum al dunyawiyah*). Pendidikan Islam lebih banyak memberikan penekanan kepada ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tafsir dan hadith sementara ilmu-ilmu dunia (*al ulum al dunyawiyah*) seperti ilmu alam dan eksakta sebagai pengembangan sains dan tehnologi tidak mendapat tempat. Hal ini menyempang tidak relevan dengan Islam sendiri yang mana Islam tidak membedakan (tidak ada dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.<sup>72</sup> Pada era modern madrasah masih tetap hidup namun demikian, eksistensinya dipertanyakan ketika kurikulumnya masih dimonopoli oleh *al ulum al naqliyah* dan menaruh jarak dengan sains modern dan kurikulum madrasah yang membatasi diri pada ilmu-ilmu agama agaknya mengancam eksistensinya sendiri. Namun, semuanya masih sangat bergantung pada kemampuan pengelola madrasah serta pihak -pihak yang berwenang, (jejak) untuk mengembangkan dan membawa madrasah keluar dari persoalan-persoalan klasik yang dihadapi selama ini misalnya dengan lebih proporsional dalam menampilkan ilmu-ilmu agama sebagai cirinya.

Persoalan lain yang dihadapi madrasah tidak hanya yang berkenaan dengan substansi atau isi pendidikannya yaitu perkembangan secara kuantitatif atas jumlah madrasah swasta

<sup>69</sup>Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bakti, 1984), 19.

<sup>70</sup>Tim Kompas, *Pesantren: dari Pendidikan hingga Politik* dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 130

<sup>71</sup>Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) dan (2) dan pasal 2

<sup>72</sup>Maksum, *Madrasah : Sejarah dan perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), vii-viii.

jauh lebih banyak dari madrasah negeri yang secara pengelolaan pun berbeda keduanya dimana madrasah swasta pengelolaannya memiliki banyak keterbatasan<sup>73</sup>.

Tabel 2.1

No	Jenjang Madrasah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Ibtida'iyah	1.025	23.625	24.650
2	Tsanawiyah	853	7.547	8.600
3	Aliyah	57	2.701	2.758

Sumber : Kebijakan Umum DEPAG, dalam Pembinaan Madrasah 1998 (dalam A.Malik Fadjar, Madrasah dan tantangan modernitas

Peran pesantren telah lama diakui oleh masyarakat, demikian halnya dengan madrasah dan sekolah Islam misalnya tentang peradaban. Kepiawaian pesantren, madrasah dan sekolah Islam dalam memformulakan pemahaman dan pemikirannya sehingga melahirkan kultur yang mengadabkan manusia adalah potensi riil pesantren, madrasah dan sekolah Islam. Di era global kepiawaian, kultur dan peran strategis itu harus menjadi lebih dimunculkan, atau dituntut untuk dilahirkan kembali Pesantren, madrasah dan sekolah Islam mempunyai reputasi tersendiri sebagai lembaga yang bercirikan agama Islam. Pertama, sebagai lembaga pendidikan karena pesantren, madrasah dan sekolah Islam pada umumnya menyelenggarakan pendidikan berciri khas yang membedakan dengan yang lain. Kedua, sebagai lembaga lembaga sosial kemasyarakatan yang dibuktikan dengan diharapkannya kehadiran pesantren, madrasah dan sekolah Islam dalam masyarakat.

Pesantren, madrasah dan sekolah Islam di sini dianggap sebagai lambang permanensies seorang kiyai di komunitas, atau daerah tertentu. Di bidang ini pesantren, madrasah dan sekolah Islam bertujuan merubah dan mengembangkan perilaku masyarakat Pesantren merupakan institusi yang banyak dipuji orang, khususnya masyarakat muslim, demikian Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia. Namun di saat yang sama sering pula mendapat kecaman dan dilabelkan sebagai institusi yang banyak "menghambat" kemajuan Islam. Kontroversi mengenai pesantren seperti itu secara tidak langsung telah menempatkan pesantren sebagai institusi yang cukup penting untuk selalu diperhatikan. Pandangan positif akan menempatkan kontroversi tersebut sebagai peluang untuk memperkuat peran pesantren itu sendiri.

Sama halnya Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Agama, selama ini masih dipandang rendah kualitasnya oleh sebagian masyarakat. Bahkan rentang waktu perjalanan sekolah yang bernama madrasah di bumi pertiwi ini (Indonesia) sangat panjang, dapat dikatakan hampir sama dengan irama dinamika dunia pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, maka upaya-upaya yang ditujukan untuk mengembangkan kualitas agar citra sekolah ini tidak selalu menjadi nomor dua, setelah sekolah umum yang lain, banyak hal yang bisa dilakukan oleh stakeholder madrasah.

Sejalan dengan perkembangan global, pendidikan Islam menghadapi tantangan manajerial yang cukup mendasar. Harapan dari berbagai pihak agar pendidikan dikelola dengan pola "industry pendidikan" merupakan salah satu perkembangan yang muncul dalam era kompetitif saat ini. Manajemen pendidikan tidak lagi bisa dianggap sebagai

<sup>73</sup>Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi* (Malang: UMM, 2006), 111-114.

“manajemen sosial” yang bebas dari keharusan pencapaian target dan dikendalikan oleh subyek yang berwawasan “sempit”, misalnya dengan pendekatan kekeluargaan seperti dijumpai di sebagian pesantren di Indonesia. Sesuatu yang dapat dikembangkan mengenai peran madrasah, pesantren bahkan sekolah Islam sekalipun, adalah pada peran strategisnya dalam mengelola pola manajemen strategik yang dapat menghasilkan rumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana untuk mencapai sasaran-sasaran madrasah, pesantren dan sekolah Islam<sup>74</sup>

Dalam konteks pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah Islam, apabila penerapan “manajemen instruksional” dirumuskan dalam pola-pola praktis yang kaku oleh pemegang kebijakan, akan mengakumulasi kerawanan masalah. Seperti proses pembelajaran yang kurang memadai, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang tidak profesional dan lain sebagainya. Membiarkan pola seperti ini berkembang (tanpa ada solusi alternatif menuju perkembangan pesantren, madrasah dan sekolah Islam ke depan) pada saatnya akan mengancam eksistensi pesantren, madrasah dan sekolah Islam itu sendiri. Yang terpenting dari semua ini dalam melaksanakan pengelolaan manajemen madrasah terutama pada perannya yang seluruh potensi yang dimiliki stakeholder dan kemudian secara bersama menyusun program dan rencana pengembangan pesantren, madrasah dan sekolah Islam secara bertahap serta meneguhkan kembali komitmen stakeholder kepada pentingnya pendidikan Islam (madrasah) dalam rangka mempersiapkan subyek didik yang cerdas, bermoral dan memiliki ketrampilan, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran perkembangan zaman.

Berbicara mengenai akar sejarah pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Karena pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia<sup>75</sup> sekalipun demikian informasi-informasi lain membuktikan bahwa sistem pendidikan pesantren, madrasah, merupakan adaptasi dari sistem pendidikan yang telah dikembangkan sebelumnya. Satu informasi mengatakan bahwa, pesantren, madrasah dan sekolah Islam seperti dikemukakan pendapat pertama yaitu merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari praktik pendidikan pra-Islam atau masa kekuasaan Hindu Budha, Nurcholis Madjid setuju dengan pendapat ini. Sebagaimana disebutkan bahwa pesantren<sup>76</sup> memiliki hubungan historis dengan lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu Budha, lalu Islam meneruskan dan mengIslamkannya.<sup>77</sup>

Para ahli di mana pun juga, sepakat bahwa sistem pendidikan yang terkait perlu diperbaharui secara berkesinambungan, atas pemahaman tersebut pakar pendidikan mengambil langkah-langkah menuju perbaikan sistem pendidikan tradisional menuju sistem pendidikan modern yang dilengkapi dengan pola manajemen sebagai standar mutu. Bagi masyarakat luas, dengan tujuan supaya madrasah tidak dianggap sebagai salah satu pendidikan yang “bercirikan” tradisional, sehingga kiat-kiat untuk menepis anggapan masyarakat tersebut di atas diperlukan manajemen yang tertata dalam sistem pendidikan modern.

<sup>74</sup> Agus Maulana, MSM dalam Pearce Robinson, *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengenalan* (Jakarta : Binarupa Aksara, 1997), 20.

<sup>75</sup> Amin Haedari dalam Jurnal Pondok Pesantren Mihrab, vol. II No. 1 Juli 2007, 34

<sup>76</sup> Dari penamaan pesantren sendiri terkait dengan terminology yang ada di kalangan Hindu. Kata pesantren berakar dari kata santridengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut C.C.Berg istilah tersebut berasal kata India Shastri, berarti orang-orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata Shastri sendiri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku Agama atau pengetahuan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pesantren memiliki hubungan historis dengan Timur Tengah. Terkait dengan pengaruh Timur Tengah ini sudah banyak yang membuktikan terutama mereka yang melakukan ibadah haji di Mekah dan Madinah.

<sup>77</sup> Amin Haedari, *Jurnal*, 34.

### Reaktualisasi Peran strategis Pesantren , Madrasah dan Sekolah Islam

Sudah banyak diketahui bahwa peran pesantren secara konvensional adalah melakukan proses transfer ilmu agama Islam, mencetak kader-kader ulama', dan mempertahankan tradisi. Dalam perkembangan modern, pesantren, madrasah dan sekolah Islam menghadapi tantangan baru, di mana ketiga lembaga Islam tersebut tidak bisa mengelak dari proses modernisasi itu. Dampak dari modernisasi setidaknya mempengaruhi pesantren, madrasah dan sekolah Islam tersebut dari berbagai aspeknya . Di antaranya adalah sistem kelembagaan , orientasi hubungan kyai-santri, kepemimpinan dan peran pesantren , madrasah dan sekolah Islam. Orientasi peran pesantren, madrasah dan sekolah Islam sangat dipengaruhi oleh faktor internal pesantren, terutama pandangan dunia kiyainya, dan faktor luar, perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>78</sup>

Mencermati perkembangan globalisasi yang kian marak ini, bisa dipastikan banyak orang yang "meyakini" bahwa peran pesantren, madrasah dan sekolah Islam dalam menyebarkan Islam di bumi nusantara ini. Hanya saja, tidak banyak dari mereka yang mengetahui kapan pesantren pertama kali lahir. Para sejarawan pun tidak sepakat mengenai awal berdirinya pesantren. Keberadaan pesantren, madrasah dan sekolah Islam tidak bisa dilepaskan dari penyebaran Islam di Indonesia. Proses globalisasi yang terus menemukan momentumnya sejak dua dasawarsa menjelang milenium baru telah memunculkan wacana baru dalam berbagai lapangan kehidupan literatur akademik, media massa, forum-forum seminar, diskusi, dan pembahasan dalam berbagai lembaga. Penggunaan istilah "globalisasi" semakin meluas termasuk di Indonesia, penggunaan istilah lain seperti "kesejahteraan" tidak cukup representatif untuk menampung semua makna dan nuansa yang tercakup dalam istilah "globalisasi." "Globalisasi" adalah kata yang digunakan untuk mengacu kepada "bersatunya" berbagai negara dalam globe menjadi satu entitas.

Secara denotatif "globalisasi " berarti perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan negara bangsa yang mempengaruhi fundamen-fundamen dasar pengaturan hubungan antar manusia , organisasi-organisasi sosial , dan pandangan - pandangan dunia<sup>79</sup> Beberapa pesantren yang awalnya hanya mengajarkan kitab-kitab kuning dan bertujuan mencetak kader ulama', kemudian berubah dengan menawarkan sekolah formal, seperti madrasah atau sekolah , adalah bukti pesantren mengalami perubahan orientasi.

Perubahan ini terutama sekali dipengaruhi oleh faktor kyai, yang dalam pesantren tradisional adalah pemilik sekaligus pemimpin absolut dari pesantren tersebut. Persinggungan kyai-kyai tradisional dengan budaya luar, baik melalui ibadah haji maupun kegiatan lainnya, turut menyumbangkan gagasan pembaruan yang dilakukan kyai. Para Kyai yang sudah "modern" itu beranggapan bahwa santri tidak cukup dibekali dengan pengetahuan agama semata, melainkan harus memiliki tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupannya ketika terjun dan kembali ke masyarakat. Beberapa pesantren yang membuka sekolah dan madrasah formal, selain karena gagasan pembaruan kyai, juga disebabkan karena tuntutan zaman. Oleh karenanya pesantren-pesantren yang membuka sekolah dan madrasah sedikit banyak dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat tentang tenaga profesional yang memiliki akhlak mulia. Pada awal kemerdekaan, negara banyak membutuhkan pegawai negeri sipil. Untuk memenuhi kebutuhan itu , pesantren tidak tinggal diam. Pendirian sekolah dan madrasah adalah bentuk respon pesantren atas

<sup>78</sup> Sri Hanianingsih, *Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia* NO. 1. VOL. I. 2008, 36.

<sup>79</sup> Azyumardi Azra dalam *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab*, vol. II No. 1 2 November 2007, 6.

kelangkaan pegawai negeri sipil. Pesantren berharap, stock PNS dari lulusan pesantren memiliki kelebihan di bidang akhlaknya dibanding lulusan dari sekolah biasa<sup>80</sup>

Dalam perkembangan modern seperti saat ini, tuntutan peran pesantren semakin kompleks. Problem-problem sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti masalah disintegrasi, kemiskinan, kemunduran akhlak sudah semakin terbuka dan merajalela di masyarakat. Pesantren diharapkan tidak saja mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan faham keagamaan, tetapi juga diharapkan dapat terlibat menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, pesantren yang di dalamnya ada madrasah dan sekolah Islam memiliki peluang dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam menuntaskan problem-problem social tersebut. Apalagi pesantren tersebut memiliki karakter sosial dan kedekatan emosi dengan masyarakat karena sifat egalitar dan kesahajaannya yang memungkinkannya dapat berinteraksi secara intensif dengan masyarakat (misalnya salah satu contoh pesantren Sunan Pandanaran yang bertempat Dusun Candi, Sardonoharja, Ngaglik, Sleman, ) setiap sebulan sekali tepatnya pada setiap Kamis Wage terlihat bagaimana tumpah ruah masyarakat dari berbagai Kecamatan bahkan Kabupaten di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta juga luar propinsi mendatang pengajian mujahadah akbar yang kontennya adalah syiar Islam dan sekaligus media komunikasi antar masyarakat Islam dalam rangka mencari solusi tentang problem-problem sosial kehidupan yang semakin "menghimpit" terutama pasca kenaikan BBM ini dan kesadaran diri sebagai hamba atau kholifah kepada sang *khaliq*. Dengan demikian, esensi peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah Islam ada dua pokok, yaitu mencetak kader ulama' yang mendalami ilmu agama dan pada saat yang sama mengetahui, terampil, dan peduli terhadap persoalan keummatan. Pesantren adalah tempat untuk mencetak kader. Lulusan Pesantren diharapkan baik agamanya dan pandai menghadapi persoalan umat.<sup>81</sup>

Madrasah dan sekolah Islam terlibat maksimal dalam membangun bangsa ini. Melalui pesantren, madrasah dan sekolah Islam, para santri atau siswa belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu sosial yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan seterusnya pesantren menjadi lembaga pengkaderan bagi santri atau siswa yang kelak siap terjun di masyarakat. Peran pesantren yang demikian ini sesungguhnya tidak asing lagi di kalangan dunia pesantren, karena dunia pesantren sudah tahu betul bahwa setiap manusia yang ingin sukses harus menguasai ilmu dan inovatif sebagaimana hadith Rasulullah saw. yang artinya "barang siapa ingin sukses dalam urusan dunia harus memiliki ilmunya, sama halnya ingin sukses akhirat, dan barang siapa ingin menghendaki keduanya, baginya juga menguasai ilmu dunia dan akhirat.

Pesantren, madrasah dan sekolah Islam harus menjadi besar seiring dengan ekspektasi masyarakat yang semakin besar terhadap pesantren, madrasah dan sekolah Islam, terutama setelah pendidikan yang lain tidak mampu memenuhi tuntutan mental dan akhlak yang diharapkan masyarakat. Pesantren dimulai dengan menetapkan visi dan misi yang tepat, yaitu mencetak kader yang ahli di bidang agama dan mumpuni dalam urusan sosial, kemudian bersama pemerintah membangun kemitraan untuk merumuskan kebijakan dan program pengembangan pesantren, madrasah dan sekolah Islam di masa depan. Saran sederhana misalnya dengan mengacu kepada system mutu sekolah formal yang

<sup>80</sup>Amin Haedari dalam *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab*, vol. II No. 1 Juli 2007, 36

<sup>81</sup>Sri Hanianingsih, *Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia* NO. 1. VOL. I. 2008, 37



tersandarisasi dan aspek manajerial yang berbasis industri dengan tetap mengacu kepada al Qur'an Hadith.

### Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Madrasah adalah salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam, Pada awal perkembangannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan madrasah sebagai model dan sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945, Perkembangan madrasah sejak tahun 1970-an jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Peningkatan Mutu Madrasah yang bertujuan agar madrasah memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam system pendidikan nasional.<sup>82</sup> Sebagai tindak lanjutnya adalah surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama Nomor 9299/U/1984 no 45 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan kurikulum Madrasah. Setelah ditetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu bab VI pasal 17 dan 18 , maka kedudukan madrasah semakin kuat karena secara tegas posisinya disebut sejajar dengan sekolah umum yang sederajat. Kedudukan secara formal yang ditetapkan sederajat sebagai produk kebijakan politik pendidikan pemerintah, tentu belum sepenuhnya dapat mendongkrak wibawa akademik madrasah sampai saat ini seperti munculnya opini bahwa madrasah adalah *second class*. Oleh karena itu madrasah harus membenahi diri mengejar ketertinggalannya dalam penguasaan pengetahuan umum di sekolah umum dengan tetap memberikan perhatian yang memadai dalam penguasaan pengetahuan agama

### Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Abdurrahman, Mas'ud. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- 'Abu al-Al, Hasan. *al Tarbiyah al Islamiyah fi al Qarn al Rabi' al Hijri*, Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1978.
- 'Abud, 'Abd al Ghani, *Dirasat Muqaranat li Tarikh al Tarbiyah*, Kairo: Dar al Fikr al Arabi, 1987.
- Al Abrasyi, Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* terjemahan Bustami A.Gani dan Djohar Basri L.I.S., Cet.ke 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al Kailani, Majid Irsan. *Falsafah al Tarbiyah al Islamiyah*, Makkah : Maktabat al Hadi, 1987.
- Al Razy, *Ajaib al Qur'an*, Beirut : Dar al Fikr al Ilmiyah 1282 H
- Asohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Azra, Azyumardi (Ed.), *Prespektif Islam di Asia Tenggara* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991)
- Azra, Azyumardi. *Pesantren Kontinuitas dan PerubahanI*, Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995.
- Bulliet, Richard W. *The Patrician of Nishapur: a Study in Medieval Islamic Social Histoty*, Harvard: Harvard University Press, 1972.
- Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986.

<sup>82</sup>Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) dan (2) dan pasal 2

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Haidari, Amin. *Jurnal Pondok Pesantren Mihrab*, vol. II No. 1 Juli 2007.
- Hadianingsih, Sri, *Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia* NO. 1. VOL. I. 2008
- Hitti, Philip K, *History of the Arab*, London : Mac Millan Press Ltd,1974.  
<http://www.walikhwan.net/pendidikan.islam-dan-hasan-albanna>  
<http://www.blogger.com/feeds/35417963/posts/default>  
<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/pendidikan/3770-apa-arti-madrasah-bagi-indonesia.html>
- Khayyat, Muhammad Jamil, *al Nazariyyah al Tarbawiyah fi al Islam*, Makalah alsafa, 1986.
- Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi*, Malang: UMM, 2006.
- Langgung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1992.
- Makdisi, George, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*, Edinburgh: Edinbrugh University Press, 1981.
- Makdisi, George, *Muslim Institution of Learning in Eleventh-Century of Baghdad*, tt.
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mursi, Muhammad Munir. *al Tarbiyah al Islamiyah, Usuluha wa Tatawwuruha fi al Bilad al Arabiyah*, Kairo:Dar al Ma'arif, 1987.
- Rahardjo, Dawam. *Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan* dalam Dawam Rahardjo (Ed.) *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3Es, 1995.
- Shaleh, Abdurrahman. *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Bakti, 1984
- Stanton, Charles Michael. *Higher Learning in Islam*, Maryland:Rowman and Little field Inc, 1990.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Steenbrink, Karel A, "Qur'an Interpretations of Hamzah Fansuri (CA.1600) and Hamka (1908-1982): A Comparison", 1994.
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta:Mutiarasumber Widya, 1992.
- Ziemek, Manfred. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Butche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1983.